

Kinerja Pegawai Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Di Kabupaten Jeneponto

Yansar^{1*}, Muhlis Madani², Abdi³

- 1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- 3) Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to find out how the performance of employees in the participatory planning process carried out by the Regional Development Research and Development Planning Agency (Bappeda) of Jeneponto Regency. This study used descriptive qualitative research methods. This study used three data collection techniques were observation, interviews with 8 informants and documentation. While data analysis used data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study showed that the community participates in the development planning process but in its implementation it was found that development realization was not in accordance with the community's proposal. The conclusion of this study was that community participation could determine how their proposals were realized in real development.

Keywords: *Participatory Development, Planning, and Development*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai dalam proses perencanaan partisipatif yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan akan tetapi dalam implementasinya ditemukan realisasi pembangunan yang tidak sesuai dengan usulan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat dapat menentukan bagaimana usulan-usulan mereka direalisasikan dalam pembangunan nyata.

Kata Kunci: kinerja, perencanaan, dan pembangunan partisipatif

* yansar23@gmail.com

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat fundamental dalam organisasi, apapun bentuk dan tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi misi untuk kepentingan didalam maupun diluar organisasi. Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, menuntut setiap organisasi mendapatkan pegawai yang mempunyai kompetensi, integritas, berkualitas, dan produktif untuk melaksanakan tugas dan wewenang didalam suatu organisasi.

Di era persaingan global yang ketat, sumber daya manusia dianggap sebagai salah satu faktor yang paling penting memerankan peran utama dalam menjaga keberlanjutan organisasi.

Pengembangan sumber daya manusia juga memiliki hubungan langsung dengan profitabilitas organisasi. Oleh sebab itu, setiap organisasi disarankan untuk terus mengoptimalkan kinerja pegawai dalam memberikan partisipasi yang optimal, antara lain dengan cara melakukan suatu program pelatihan serta pengembangan agar pegawai memiliki keterampilan yang memadai. Hal ini

juga berkaitan dengan produktivitas organisasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan.

Kinerja juga dapat dipengaruhi melalui hubungan tak langsung antara kepuasan kerja terhadap motivasi kerja. Kepuasan kerja sendiri diartikan sebagai suatu sikap positif yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap apa yang diharapkan akan diperoleh melalui upaya-upaya yang dilakukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan hasil atau ganjaran yang diterimanya. Sehingga kinerja sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pekerjaan baik instansi swasta maupun pemerintahan.

Kinerja dalam instansi pemerintahan sangat diprioritaskan terhadap semua pegawai dalam keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti pada instansi Bappeda Kabupaten Jeneponto memerlukan pegawai yang mempunyai kinerja yang baik dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif.

Salah satu pola pendekatan perencanaan pembangunan yang kini sedang dikembangkan adalah perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan

perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*). Nampaknya mudah dan indah kedengarannya, tetapi jelas tidak mudah implementasinya karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana sosialisasi konsep itu di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun demikian, perencanaan pembangunan yang melibatkan semua unsur/komponen yang ada dalam masyarakat tanpa membeda-bedakan ras, golongan, agama, status sosial, pendidikan, tersebut paling tidak merupakan langkah positif yang patut untuk dicermati dan dikembangkan secara berkesinambungan baik dalam tataran wacana pemikiran maupun dalam tataran implementasinya di tengah-tengah masyarakat. Sekaligus, pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan ini yang membedakan dengan pola-pola pendekatan perencanaan pembangunan sebelumnya cenderung sentralistik.

Dengan adanya perencanaan pembangunan partisipatif dapat menyaring semua aspirasi dari masyarakat serta ikut melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh instansi Bappeda, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu masih mengeluhkan dengan kondisi lingkungannya yang dimana usulan program perbaikan jalan yang dulunya diusulkan sampai sekarang belum ada tanggapan positif dari pemerintah dilihat dari belum terealisasikan perbaikan jalan yang ada di Kelurahan Sidenre.

Menurut Hasibuan (2000) Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya fisik dan pikir yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya sendiri dimotivasi dari keinginan untuk memenuhi kepuasannya. SDM terdiri dari daya fisik dan daya fikir setiap manusia, tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya fikir dan daya fisiknya.

Menurut As'ad (2001) mengatakan kinerja adalah hasil kerja

yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Moehariono (2012:95) Kinerja yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan visi misi, sasaran dan tujuan organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategi suatu organisasi.

Kinerja juga dapat dipengaruhi melalui hubungan tak langsung antara kepuasan kerja terhadap motivasi kerja, hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Lusri & Hotlan Siagian (2017) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan mediasi antara motivasi kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan atau keinginan dalam diri pegawai, maka akan tercipta perasaan puas, dan pegawai yang tingkat kepuasannya tinggi maka secara otomatis juga mengalami peningkatan dalam kinerja. Menurut kedua definisi diatas menekankan pada pentingnya motivasi

kinerja yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahannya.

Motivasi sendiri diartikan sebagai suatu dorongan atau penggerak dalam diri manusia yang dapat mengarahkan, menimbulkan, dan mengorganisasikan tingkah laku (Darmawan 2013).

Menurut Payaman J Simanjuntak (2005) ada tiga faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu 1) Faktor individu, faktor individu merupakan kemampuan dan keterampilan yang didapatkan dijenjang pendidikan dalam melakukan pekerjaan serta motivasi yang dimiliki dalam diri seseorang. 2) Faktor dukungan organisasi, dalam melaksanakan tugasnya pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat dia bekerja. Dukungan tersebut adalah bentuk penyediaan sarana dan prasarana kerja, uraian tugas dan jabatan, kenyamanan lingkungan kerja, pengorganisasian, serta kondisi dan syarat kerja. 3) Faktor dukungan manajemen, kinerja pegawai juga sangat tergantung pada keterampilan konseptual atau keterampilan teknis yang dimiliki oleh pimpinan, sehingga dapat membangun dan mengembangka kompetensi pegawai serta sistem kerja dan

hubungan industrial yang aman dan harmonis.

Dalam mencapai tujuan pada suatu organisasi perlu dibuat perencanaan. Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan/keterbatasan sumber daya termasuk sumber dana yang tersedia sehingga mengharuskan mempertimbangkan skala prioritas dalam menentukan suatu pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Menurut Siagian (2008:88) “perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. Perencanaan merupakan suatu proses untuk memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi dan memikirkan alternatif pemecahannya serta memikirkan kondisi ideal yang diharapkan.

Grijns dalam Paselle (2013), berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu metode praktis sebagai alat pendekatan yang sistematis dan ilmiah. Pemikirannya berpijak pada suatu dikotomi yang membagi perencanaan dalam arti sempit dan perencanaan dalam arti luas.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan perencanaan merupakan suatu proses penentuan pilihan terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, penentuan pilihan terhadap alternatif-alternatif tindakan yang perlu dilakukan, kemudian mengarahkan setiap tindakan agar pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan. Perencanaan terdiri dari beberapa tahapan yang dilalui untuk dapat mencapai suatu perencanaan yang ideal.

Perencanaan merupakan suatu kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum kegiatan pokok dilaksanakan. Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan/keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia sehingga tidak menyulitkan dalam menentukan suatu pilihan kegiatan. UU 25 Tahun 2004 Tentang SPPN, dimana perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional,

yang ketentuannya diatur pula dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penyempurnaan sistem perencanaan dilakukan baik dalam hal proses maupun tahapannya. Pendekatan perencanaan tersebut meliputi: pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, dan pendekatan *bottomup* (bawah-naik) dan *top-down* (atas-turun).

Pengertian partisipasi menurut Suryono (2001) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi warga menurut Sumarto (2003 :17) adalah “proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”. Partisipasi

memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut mempengaruhi suatu kebijakan sejak awal yaitu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauannya.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan setelah ujian proposal. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto. Tipe penelitian ini yang digunakan yaitu deskriptif. Adapun masalah-masalah yang diteliti mengenai Kinerja Pegawai Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) di Kabupaten Jeneponto dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yaitu, 1) *Citizen Control*, 2) *Delegated Power*, 3) *Partnership*, 4) *Placation*, 5) *Consulation*, 6) *Informinng*, 7) *Therapy*, dan 8) *Manipulation*. Serta dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu 1) Faktor Individu, 2) Faktor Organisasi, dan 3) Faktor Manajemen.

Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penulis melakukan wawancara dengan

informan menggunakan pedoman wawancara. Dengan jumlah informan, 8 informan, 1 orang kepala bidang perencanaan makro, evaluasi dan pelaporan, 1 orang kepala bidang Penelitian dan Pengembangan, 1 orang Kepala Kelurahan Sidenre, 1 orang staf Kelurahan Sidenre, 1 orang Kepala Lingkungan Bosalia, 1 orang LSM Pattiro Jeka, 1 orang Tokoh Masyarakat, dan 1 orang Masyarakat.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Untuk menyajikan data dari berbagai jawaban informan, penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta teknik keabsahan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan perangkat daerah Kabupaten Jeneponto bertempat di jalan Lanto dg Pasewang No. 34 yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah No.4 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja teknis daerah Kabupaten Jeneponto, serta memiliki kewenangan sebagaimana telah diatur dalam

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Berdasarkan peraturan Bupati Jeneponto No 27 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jeneponto, memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut, 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Jeneponto dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas pokok memimpin, membina, meneliti, mendokumentasikan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan meliputi: a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), c) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), d) Rencana strategis (Renstra) dan dokumen lainnya serta mengevaluasi kebijakan tahunan dan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah. 2) Dalam melakukan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) menyelenggarakan fungsi: a) Merumuskan kebijakan umum perencanaan dan penganggaran daerah, b) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan

program/kegiatan dan penganggaran lintas sektor, c) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah, d) Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah, e) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dan kesekretariatan badan, f) Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik dan penguatan daya saing daerah menuju masyarakat jeneponto yang sejahtera.

Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang bertumpu pada potensi lokal, Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan, dan akuntabel, dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama.

Salah satu pola pendekatan perencanaan pembangunan yang kini sedang dikembangkan adalah perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya bukan saja sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek pembangunan, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah (*bottom-up approach*).

Dengan adanya perencanaan pembangunan partisipatif dapat menyaring semua aspirasi dari masyarakat serta ikut melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu Instansi Bappeda dan Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Citizen Control

Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingannya. Masyarakat mempunyai wewenang dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak

melakukan perubahan. Masyarakat dapat berpartisipasi didalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan.

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat diikut sertakan dalam mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan akan tetapi perlu bersinergi dengan SKPD agar program yang diusulkan sinkron dengan apa yang diusulkan oleh hasil musrembang kelurahan.

Dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan dari awal perencanaan hingga tahap pengambilan keputusan sudah ada yang diberikan kepercayaan dari masyarakat akan tetapi orang yang sudah diberi kepercayaan harus memperjuangkan apa yang menjadi usulan program masyarakat tanpa dipengaruhi dengan kondisi politik maupun sosial budaya.

Delegated Power

Pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu. Untuk menyelesaikan permasalahan, pemerintah harus mengandalkan negosiasi dengan masyarakat tidak dengan tekanan dari atas, dimungkinkan masyarakat

mempunyai tingkat kendali atas keputusan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis menyimpulkan bahwa Delegated Power (Pendelegasian Wewenang) sudah melibatkan masyarakat akan tetapi tidak semua dilibatkan dalam pengambilan keputusan perencanaan karna ada keputusan yang diambil langsung dari elit politik yang tidak ada campur tangan msayarakat didalam sebuah keputusan itu.

Partnership

Pada tahap tingkatan partisipasi ini masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Untuk itu, diambil kesepakatan saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijakan serta pemecahan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemerintah sudah menjadikan masyarakat sebagai rekan kerja. Kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan agar memudahkan sebagian pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah, bukan

hanya itu agar supaya terjalin keharmonisan antara pemerintah dengan masyarakat.

Placation

Pada tahap level partisipasi ini pemerintah mendengarkan dan menerima berbagai kritik dan saran yang disampaikan masyarakat, namun pemerintah tetap menjalankan pada rencana semula.

Kritik dan saran yang diberikan masyarakat terhadap pemerintah sangat diperlukan sehingga kritikan itu menjadi acuan untuk dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya. Banyak yang menganggap kritikan itu adalah cemoan yang diberikan sehingga banyak yang menyepelkan kritikan yang diberikan kepadanya.

Dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah memberikan saran kepada Kelurahan mengenai tentang kondisi lingkungannya. Tetapi Kepala Kelurahan mempunyai suatu alasan mengapa sampai saat ini saran yang diberikan oleh masyarakat belum ditindaklanjuti oleh Pihak Kelurahan.

Consulation

Pada tahap level partisipasi ini, masyarakat tidak hanya diberitahu tetapi

juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pada tahap ini terjadi dialog kedua belah pihak tentang berbagai persoalan, saran dan kritik ditampung namun keputusan akhir ada dipemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pihak pemerintah sudah membuka ruang untuk siapa saja yang ingin berkonsultasi mengenai hal-hal yang masih bersifat tanda tanya. Pemerintah juga sudah membuka forum untuk menerima kritikan maupun saran yang diberikan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya rapat yang dilakukan oleh pemerintah dapat memecahkan sebuah masalah dengan sama-sama mencarikan solusi yang tepat. Kita dapat menemukan solusi apabila kita saling bertukar pikiran atau saling berbagi pendapat dengan orang lain, dan dapat menerima kritik maupun saran yang diberikan orang lain kepada kita.

Informing

Pada tingkatan level ini pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi

kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab, dan berbagi pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi merupakan suatu hal yang tidak asing lagi didengar oleh telinga kita. Masyarakat sangat membutuhkan informasi pada tahap ini sehingga mereka banyak mengetahui apa-apa yang disampaikan mengenai perencanaan program yang akan diusulkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menarik kesimpulan bahwa masyarakat sudah mendapatkan informasi dari pihak kelurahan maupun pihak pemateri sewaktu musrembang berlangsung, akan tetapi masyarakat memerlukan informasi yang jelas dan akurat mengenai apa-apa yang menjadi perencanaan ataupun apa-apa yang akan diprogramkan untuk tahun akan datang.

Therapy

Anggota komunitas lokal memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan tetapi jawaban anggota komunitas tidak memberikan pengaruh terhadap kebijakan, merupakan kegiatan dengar pendapat tetapi sama sekali tidak

dapat mempengaruhi program yang sedang berjalan. Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari penyelenggara program dan hanya satu arah. Pemegang kekuasaan menganggap ketidakberdayaan sebagai penyakit mental, dengan mengikut sertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan, namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan lukanya bukan menemukan penyebab lukanya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa masyarakat sudah diberi kesempatan dalam membuat perencanaan atau mengusukan sebuah program kerja pembangunan yang ada dikelurahan sidenre akan tetapi program yang diusulkan masyarakat tidak ada yang terealisasikan. Olehnya dibutuhkan perhatian penuh oleh pemerintah untuk menganalisis yang menjadi usulan program masyarakat.

Manipulation

Pada tingkatan ini dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Partispasi yang tidak perlu menuntut respon partisipan untuk terlibat banyak. Pengelola program akan meminta anggota komunitas yaitu orang-orang yang berpengaruh untuk

mengumpulkan tanda tangan warga sebagai wujud kesediaan dan dukungan warga terhadap program.

Dari hasil diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengikuti musrembang dengan cara mengundang masyarakat untuk terlibat didalam kegiatan musrembang. Penulis dapat mengatakan masyarakat dengan antusiasnya terlibat dengan mengusulkan suatu program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun kedepannya.

Faktor Individu

Faktor individu adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja. Kompetensi seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang yang dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu: 1) kemampuan dan keterampilan kerja, Setiap orang memiliki kemampuan atau keterampilan yang diberikan atau dianugerahkan oleh tuhan sang pencipta jagad raya. Sebagian lagi tidak menyadari keterampilan dalam dirinya sendiri. Kata keterampilan identik dengan kata kecekatan. Orang yang dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya secara cepat dan benar. Akan tetapi, apabila orang tersebut

mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat akan tetapi hasilnya tidak sesuai atau salah maka orang tersebut bukanlah orang yang disebut terampil.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa semua manusia dianugerahkan kemampuan atau keterampilan oleh tuhan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang menimpa dirinya. Salah satu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh pegawai bappeda dalam hal menyelesaikan pekerjaan dengan se efisien mungkin. 2)serta motivasi dan etos kerja, Motivasi dan etos kerja disini berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan partisipatif oleh Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah (Bappeda).

Faktor Organisasi

Dalam melaksanakan tugasnya pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat dia bekerja. Dukungan tersebut adalah bentuk 1) penyediaan sarana dan prasarana kerja, Sarana dan prasarana merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang ada di kantor Bappeda sudah layak dikatakan baik, walaupun masih perlu ditingkatkan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang ada di Kantor Bappeda. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti mengenai sarana dan prasarana yang ada di Kantor Bappeda masih kurangnya kursi disetiap ruangan kantor Bappeda. 2) Uraian Tugas, Uraian tugas dalam proses perencanaan pembangunan prtisipatif yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa uraian tugas yang dilakukan oleh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sudah ada tanggung jawab masing-masing dalam jabatan yang diembang, walaupun semua pegawai sedikit terlibat dalam proses perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda).

Faktor Manajemen

Manajemen dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau seni mengelola. Secara lebih lengkap manajemen dapat juga diartikan sebagai suatu seni untuk mengelola atau mengarahkan orang lain agar dapat mencapai tujuan utama organisasi melalui proses perencanaan, pelaksanaan, mengelola sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menarik kesimpulan bahwa langkah kepala bidang dalam mengarahkan anggotanya sudah baik, dan semua perencanaan yang ada sudah bisa dilihat di website SIMRAL akan tetapi walaupun tidak semua orang bisa melihat atau mengakses website SIMRAL tersebut. Akan lebih baiknya lagi ketika SIMRAL ini dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jeneponto agar masyarakat melihat langsung program yang diusulkan sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan atau

dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis merumuskan kesimpulan bahwa melihat kinerja pegawai Bappeda telah bekerja secara optimal dengan melibatkan dan menerima semua usulan program perencanaan dari masyarakat akan tetapi perlu adanya kesinambungan antara program kerja SKPD dengan apa yang menjadi program kerja di Tingkat Desa maupun Kelurahan.

Kemudian melihat dari partisipasi masyarakat Kelurahan Sidenre dalam proses perencanaan pembangunan sudah terlibat didalamnya dengan mengikuti kegiatan musrembang yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi terkadang usulan yang diusulkan oleh masyarakat kurang mendapat tanggapan positif dari pemerintah dilihat dari tidak adanya yang terealisasi program prioritas yang diusulkan oleh pihak Kelurahan yang dimana usulan itu adalah usulan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Mohammad. 2001. *Seri Ilmu SDM : Psikologi industry*. Yogyakarta: Liberty.
- Darmawan, D. H. 2013. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: Pena Semesta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Lusri, Lidia & Hotland Siagian. 2017. *Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi Pada Karyawan PT. Borwita Citra Prima Surabaya*. Jurnal agora. Vol 5 No 1.
- Moehariono. 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Paselle, Enos. 2013. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi tentang Musrembang Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara*. Jurnal Paradigma. Vol 2. No 1.
- Siagian, S. P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia (edisi pertama)*. Jakarta: Binapura Aksari.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.